



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.236, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.  
Tata Kerja. Balai Besar Dipterokarpa.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P. 27/Menhut-II/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balai Penelitian Kehutanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor : B/806/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian ekosistem hutan dipterokarpa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa berkedudukan di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian Dipterokarpa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian pelaksanaan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- c. pelaksanaan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;

- e. pengembangan teknologi hasil penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- f. penyebarluasan informasi dan teknologi (iptek) hasil-hasil di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa;
- g. pengelolaan kawasan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai Besar;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Balai Besar;
- i. pengelolaan sarana prasarana penelitian Balai Besar;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar; dan
- k. pengelolaan kepegawaian Balai Besar.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

(1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa terdiri atas :

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Data, Informasi dan Kerja sama;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Penelitian Dipterokarpa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 5

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Balai Besar.

## Pasal 7

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 8

- (1) Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan penyusunan laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) Balai Besar, menyiapkan bahan koordinasi evaluasi program pembangunan tingkat Badan Litbang Kehutanan, dan menyiapkan bahan sintesis di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa .

## Pasal 9

Bidang Data, Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi, perakitan dan pengemasan teknologi hasil penelitian, penyelenggaraan perpustakaan, fasilitasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, pengelolaan sarana penelitian termasuk hutan penelitian, serta penyiapan saran-saran kebijakan di bidang pengelolaan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Data, Informasi dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data hasil-hasil penelitian, fasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, penyiapan bahan penyebarluasan informasi dan teknologi (iptek), penyiapan saran-saran kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dipterokarpa dan pengelolaan hutan penelitian; dan
- b. penyiapan bahan perencanaan dan fasilitasi kerja sama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, serta pengelolaan sarana penelitian termasuk hutan penelitian.

### Pasal 11

Bidang Data, Informasi dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Seksi Data, Informasi dan Diseminasi; dan
- b. Seksi Kerjasama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan.

### Pasal 12

- (1) Seksi Data, Informasi dan Diseminasi mempunyai tugas mengelola data dan informasi hasil-hasil penelitian, menyiapkan data dan informasi untuk penerbitan statistik, memfasilitasi perakitan dan pengemasan teknologi, menyelenggarakan penyebarluasan hasil-hasil penelitian kehutanan melalui penerbitan publikasi, pameran, ekspose, lokakarya, gelar teknologi, temu-wicara, *policy-brief* serta penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Seksi Kerjasama, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Pengembangan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penelitian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian/hasil kerjasama penelitian, pemberian dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil-hasil penelitian, mengelola sarana penelitian mencakup laboratorium, *green house*, bengkel kerja, stasiun penelitian dan pengelolaan hutan penelitian.

### Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Negara; dan
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

### Pasal 15

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

## Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan persuratan, melaksanakan pengelolaan sarana dan rumah tangga sehari-hari, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan data pemutakhiran dan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dan menyiapkan data penyusunan strategi pengembangan pegawai serta menyiapkan materi penyusunan kebijakan kepegawaian lingkup Balai Besar.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN, melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan BMN Balai Besar, menyiapkan bahan pemeriksaan/auditing pengelolaan keuangan, dan melaksanakan tindak-lanjut/penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Balai Besar.

## BAB III

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan Jabatan Fungsional Lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Besar, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 20

Kepala Balai Besar, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di lingkungan Balai Besar wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Kepala Balai Besar, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian di lingkungan Balai Besar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 22

Kepala Balai Besar, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Besar wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 23

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Besar menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar.

### Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Besar wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

## ESELONISASI

## Pasal 26

- (1) Kepala Balai Besar adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III.b
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

## BAB VI

## LOKASI DAN WILAYAH KERJA

## Pasal 27

- (1) Balai Besar Penelitian Dipterokarpa berlokasi di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- (2) Wilayah Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa adalah seluruh wilayah Indonesia;

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : P. 27 /Menhut-II/2011  
Tanggal : 20 April 2011

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA**

